

ABSTRAK

Disertasi dengan judul “Kontradiksi Dan Harmonisasi Pencatatan Perkawinan Sirri Dalam Kartu Keluarga (Studi Kasus Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Dan Kantor Urusan Agama Jombang)” ini ditulis oleh Mahmud Huda dengan Promotor Prof. Dr. Iffatin Nur, M.Ag. dan Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag.

Kata Kunci: Perkawinan, Sirri, Status Kawin, Kawin Belum Tercatat, Kartu Keluarga, Kontradiksi, Harmonisasi, Dispendukcapil, KUA

Pencatatan perkawinan merupakan penting dalam hukum positif Indonesia sesuai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, namun banyak perkawinan belum tercatat. Kementrian Dalam Negeri telah mengeluarkan kebijakan terkait pencantuman status kawin belum tercatat dalam kartu keluarga, yaitu Surat Edaran (SE) Kemendagri dan Dirjen Dukcapil Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL namun hal ini dapat membuka peluang untuk perkawinan tanpa pengawasan. Dokumen kependudukan seperti kartu keluarga hanya melindungi dari sisi administrasi, bukan dari sisi hukum. Masalah ini dapat merugikan istri dan anak yang lahir dari perkawinan belum tercatat. Perkawinan yang belum tercatat dalam sistem kependudukan dapat menimbulkan kontradiksi hukum dan administrasi. Meskipun sah secara agama, perkawinan yang tidak tercatat dapat mengurangi konsekuensi yang seharusnya melekat pada perkawinan yang dicatatkan. Pencatatan perkawinan seharusnya tidak hanya menjadi persoalan administratif, tetapi juga harus dilihat dalam konteks pencapaian tujuan perkawinan. Tercatat sebanyak 708,224 penduduk Jombang berstatus kawin berdasarkan kepemilikan akta/atau surat nikah. Dari jumlah itu, sebanyak 475,916 status perkawinannya sudah tercatat. Sedangkan sebanyak 177,796 penduduk kawin namun dengan status kawin belum tercatat. Disinggung apakah 177,796 penduduk sudah kawin namun belum tercatat tersebut disebabkan mereka melakukan perkawinan siri atau tanpa melalui lembaga resmi negara.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana status kawin belum tercatat dalam kartu keluarga perspektif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang?; (2) Bagaimana status kawin belum tercatat dalam kartu keluarga perspektif Kantor Urusan Agama Kabupaten Jombang?; (3) Bagaimana kontradiksi Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 dan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 perspektif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dan Kantor Urusan Agama Kabupaten Jombang?; Bagaimana Harmonisasi Regulasi Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 dan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 perspektif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dan Kantor Urusan Agama Kabupaten Jombang?.

Disertasi ini bermanfaat secara teori dan praktis. Secara teori bermanfaat menambah wawasan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hukum administrasi kependudukan dan pencatatan perkawinan. Secara praktis bermanfaat

kepada praktisi hukum mengenai pencantuman status kawin belum tercatat serta dapat memberi pertimbangan dan solusi dari permasalahan pencatatan perkawinan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan penelitian lapangan dengan sumber data primer dan sekunder, serta teknik pengumpulan data seperti studi pustaka, wawancara, dan observasi. Data dianalisis secara kualitatif, dan penelitian ini bersumber dari dispendukcapil Jombang dan KUA Jombang.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa (1) Perspektif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang bahwa status kawin belum tercatat dalam kartu keluarga yang terjadi di Jombang terdapat dua macam yaitu mereka yang sudah menikah tapi belum melakukan pembaharuan data di dukcapil dan mereka yang sudah nikah tapi tidak mencatatkannya (nikah sirri). (2) Perspektif Kantor Urusan Agama Kabupaten Jombang tentang status kawin belum tercatat dalam kartu keluarga bahwa dengan adanya PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 tentang pencantuman status kawin belum tercatat hadir di KK menimbulkan masalah baru dan berpotensi menabrak aturan-aturan yang ada pada instansi lain seperti PA dan KUA dimana dalam praktiknya di Masyarakat ini memberikan kemudahan timbulnya poliandri, poligami, dan beberapa pelanggaran hak seperti waris dan akta kelahiran. Maka ini menjadi problem secara administratif karena tidak ada bukti terlampir yaitu akta cerai yang menyatakan bahwa seseorang tersebut berstatus cerai hidup/mati, maka KUA berhak menolak dan tidak melanjutkan proses perkawinannya, karena KUA harus benar standar administratif dan syari'at, solusi dari permasalahan ini harus merubah status awal sebelum terjadi perkawinan tidak tercatat. (3) Perspektif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dan Kantor Urusan Agama Kabupaten Jombang tentang Kontradiksi Permendagri Nomor 108 tahun 2019 dan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menunjukkan bahwa PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri mengatur tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan di tingkat daerah. Hal ini menekankan pentingnya pencatatan perkawinan untuk menjamin kepastian hukum bagi pasangan, anak, dan pihak lain yang terlibat. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dikenal dengan UU Perkawinan merupakan undang-undang nasional yang mengatur perkawinan di Indonesia. Meski berperan dalam mengatur perkawinan, kedua peraturan tersebut nampaknya memiliki ketentuan yang bertolak belakang dalam hal pencatatan nikah sirri di Kabupaten Jombang. Belum adanya kejelasan dan konsistensi Undang-undang/peraturan dalam pelaksanaan pencatatan nikah sirri di Kabupaten Jombang maka diperlukan harmonisasi undang-undang/peraturan tersebut. (4) Harmonisasi antara Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa setiap perkawinan di Indonesia tercatat dengan baik dan sah secara hukum. Di Kabupaten Jombang, Dispendukcapil dan KUA belum melakukan berbagai upaya untuk mendukung harmonisasi ini, termasuk dengan meningkatkan koordinasi dan mengintegrasikan sistem informasi.

ABSTRACT

The dissertation entitled “*Contradictions and Harmonization of Unregistered Marriage Documentation in the Family Card (Case Study at the Population and Civil Registration Office and the Office of Religious Affairs in Jombang)*” was written by Mahmud Huda, under the supervision of Prof. Dr. Iffatin Nur, M.Ag. and Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag.

Keywords: Marriage, Unregistered Marriage (Nikah Sirri), Marital Status, Unrecorded Marriage, Family Card, Contradiction, Harmonization, Civil Registry Office (Dispendukcapil), Religious Affairs Office (KUA)

Marriage registration is a crucial component of Indonesia’s positive law, as outlined in the Marriage Law No. 1 of 1974. Despite this, many marriages remain unregistered. The Ministry of Home Affairs has issued a circular (No. 472.2/15145/DUKCAPIL) requiring the inclusion of “unregistered marriage” status in family cards. However, this policy may unintentionally enable unsupervised marriages. Population documents like family cards provide administrative recognition, but lack legal protection—leaving wives and children from such marriages vulnerable.

Unregistered marriages, although religiously valid, may lead to legal and administrative contradictions. Without formal documentation, their consequences differ significantly from those of registered marriages. Therefore, marriage registration shouldn't be treated solely as a bureaucratic procedure, but must be seen as part of fulfilling the broader goals of marriage.

In Jombang Regency, 708,224 residents are recorded as married via marriage certificates or letters. Of those, 475,916 marriages are officially registered, while 177,796 are categorized as unregistered. A key concern is whether these unregistered marriages stem from religious-only ceremonies (nikah siri) that bypass official state institutions.

Research Questions (1)What is the view of Jombang's Department of Population and Civil Registration (Dispendukcapil) on the “unregistered marriage” status in family cards? (2) How does Jombang's Religious Affairs Office (KUA) perceive the same status? (3) How do both institutions interpret contradictions between Permendagri No. 108/2019 and Marriage Law No. 1/1974? (4)What steps are needed to harmonize these two regulations effectively?

Theoretical & Practical Benefits This dissertation contributes to both legal theory and practice—enriching academic discourse around population administration and marriage registration law, while offering practical insights to legal practitioners navigating the complex realities of unregistered marriages.

Methodology The study uses qualitative field research based on both primary and secondary data, gathered via literature review, interviews, and observation. The sources include Dispendukcapil Jombang and KUA Jombang.

Findings (1)According to Dispendukcapil, unregistered marriage status in family cards falls into two categories: couples who haven’t updated their registration and those who married without reporting it (nikah siri). (2) KUA believes Permendagri

No. 108/2019 creates new complications, possibly violating norms upheld by other agencies (e.g., the Religious Court and KUA), and facilitating issues like polygamy, polyandry, and rights violations. Due to lack of supporting documents (e.g., divorce certificates), KUA may refuse to process new marriages. (3) Dispendukcapil and KUA identify contradictions between Permendagri 108/2019 and Law No. 1/1974 regarding nikah siri. There's a lack of clarity in how to regulate and record such marriages consistently. (4) Legal harmonization between both regulations is vital to ensure every marriage in Indonesia is legally recognized. In Jombang, coordinated efforts and integrated information systems have not yet been fully implemented by both agencies.

الملخص

الرسالة العلمية بعنوان "التناقض والانسجام في تسجيل الزواج السري ضمن بطاقة الأسرة (دراسة حالة في دائرة الأحوال المدنية ومكتب الشؤون الدينية بجومبانغ)" كتبها محمود هدى بإشراف الأستاذ الدكتور عفتين نور، M.Ag. والدكتور أحمد محتي أنسور، M.Ag. الكلمات المفتاحية: الزواج، الزواج السري، حالة الزواج، الزواج غير المسجل، بطاقة الأسرة، التناقض، التوفيق التنظيمي، دائرة الأحوال المدنية، مكتب الشؤون الدينية (KUA)

يُعد تسجيل الزواج جزءاً جوهرياً من القانون الإيجابي في إندونيسيا وفقاً لقانون الزواج رقم ١ لعام ١٩٧٤، إلا أن العديد من حالات الزواج لم تُسجل رسمياً. وقد أصدرت وزارة الداخلية تعميماً رقم ١٥١٤٥/٤٧٢،٢ (DUKCAPIL) ينص على إدراج حالة "الزواج غير المسجل" في بطاقة الأسرة، ما قد يفتح الباب أمام حالات زواج غير خاضعة للرقابة. وتوفر وثائق الهوية مثل بطاقة الأسرة حماية إدارية فقط، وليست قانونية، الأمر الذي قد يضر الزوجة والأطفال الناتجين عن هذا الزواج غير المسجل. إن الزواج غير المسجل قد يؤدي إلى تناقضات قانونية وإدارية. وعلى الرغم من أنه قد يكون شرعياً من الناحية الدينية، إلا أن عدم تسجيله يُضعف الآثار القانونية المترتبة عليه، التي يجب أن ترافق الزواج الرسمي. لذلك، يجب ألا يُنظر إلى تسجيل الزواج على أنه إجراء إداري فقط، بل باعتباره جزءاً من تحقيق أهداف الزواج ذاته.

في محافظة جومبانغ، سُجل ٧٠٨,٢٢٤ من السكان كمزوجين بناءً على وثائق رسمية. من بينهم، تم تسجيل ٤٧٥,٩١٦ حالة زواج بشكل قانوني، بينما ١٧٧,٧٩٦ حالة زواج لم تُسجل بعد. ويُطرح هنا تساؤل حول ما إذا كانت هذه الحالات ناتجة عن زواج ديني (زواج سري) لم يتم من خلال مؤسسات الدولة الرسمية.

أسئلة البحث (١) ما هو منظور دائرة السكان وتسجيل الأحوال المدنية بمحافظة جومبانغ حول حالة الزواج غير المسجل في بطاقة الأسرة؟ (٢) ما هو موقف مكتب الشؤون الدينية في جومبانغ من نفس الحالة؟ (٣) كيف تنظر المؤسسات إلى التناقض بين اللائحة الوزارية رقم ١٠٨ لسنة ٢٠١٩ وقانون الزواج رقم ١ لسنة ١٩٧٤؟ (٤) كيف يمكن تحقيق التوافق بين اللوائح لضمان تسجيل جميع الزيجات بشكل قانوني؟ الفوائد النظرية والتطبيقية تساهم هذه الرسالة علمياً في توسيع المعرفة في مجال القانون الإداري وتسجيل الأحوال المدنية، وتُعد مرجعاً عملياً للممارسين في المجال القانوني لتقديم حلول للمشكلات المرتبطة بالزواج غير المسجل.

المنهجية اعتمد البحث على منهجية نوعية ميدانية، باستخدام بيانات أولية وثانوية، وجمعت البيانات من خلال مراجعة الكتب، والمقابلات، والملاحظة. وكانت المصادر الرئيسية هي دائرة الأحوال المدنية ومكتب الشؤون الدينية في جومبانغ.

نتائج البحث (١) ترى دائرة الأحوال المدنية أن حالة الزواج غير المسجل في بطاقة الأسرة تنقسم إلى نوعين: من تزوج ولم يُحدث بياناته، ومن تزوج ولم يُبلغ عن زواجه (زواج سري). (٢) يرى مكتب الشؤون الدينية أن اللائحة رقم ١٠٨ لسنة ٢٠١٩ فتحت مشاكل جديدة، وقد تتعارض مع قواعد المؤسسات الأخرى مثل المحكمة الدينية، ما يسهل ظهور حالات تعدد الزوجات والزوجات، وانتهاك الحقوق مثل الإرث وشهادات الميلاد. وغياب الوثائق الرسمية مثل شهادة الطلاق يجعل المكتب يرفض إتمام الزواج، التزاماً بالمعايير الإدارية والشرعية. (٣) يظهر أن هناك تعارضاً بين اللائحة الوزارية وقانون الزواج الوطني في ما يتعلق بتسجيل الزواج السري، مما يستدعي توحيد التشريعات لحل هذه الإشكالية (٤) إن تحقيق الانسجام بين اللائحة رقم ١٠٨ لسنة ٢٠١٩ وقانون الزواج رقم ١ لسنة ١٩٧٤ خطوة ضرورية لضمان تسجيل الزواج بشكل قانوني. وفي جومبانغ، لم تبادر الجهات المعنية بعد لاتخاذ إجراءات فعلية لتحقيق هذا التوافق، كتعزيز التنسيق بين المؤسسات وربط الأنظمة المعلوماتية بينها.